

## PT Ampuh Gugat BPK Jateng

SEMARANG, TRIBUN- Masalah pembangunan Pasar Ir Soekarno di Sukoharjo tak kunjung selesai. Pasar yang dibangun dengan anggaran Rp 24,8 miliar itu mangkrak hingga kini. Sehingga sekitar 1.023 pedagang mengaku sangat dirugikan.

Proyek itu dikerjakan oleh pemenang tender yaitu PT Ampuh Sejahtera (AS). Dalam perkembangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pembangunan pasar Ir Soekarno yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Kantor Bupati itu bermasalah.

Pedagang makin resah karena terjadi sengketa perdata antara PT Ampuh Sejahtera dengan Pemkab Sukoharjo yang tentu saja penyelesaian pembangunan pasar makin molor. Meski demikian Pemkab menyiapkan anggaran Rp 15 miliar dari APBD 2014 ini untuk lanjutkan pembangunan pasar tersebut.

PT Ampuh Sejahtera (AS), melalui kuasa hukumnya yaitu Farida Sulistyani justru menganggap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah tidak sah, menyalahi prosedur hukum.

"Saat melakukan pemeriksaan, mereka masuk lokasi secara paksa. Juga mereka tidak meminta konfirmasi kepada kami terkait hal ini," ujar Farida,

di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (16/5).

Padahal, saat itu pasar tersebut secara hukum masih dalam kuasa PT. AS. Oleh karena itu, lanjut Farida, pihaknya mengajukan gugatan secara perdata, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan itu ini ke PN Semarang.

Dalam perkara tersebut PT AS menggugat tiga pihak yaitu Kepala BPK RI, cq Kepala Perwakilan BPK Jateng, cq penanggungjawab pemeriksa, yakni Bernadetta Arum Dati. Kedua, Udy Bintarta, selaku pejabat pembuat komitmen (PPKom) Disperindag Kabupaten Sukoharjo.

"Serta Sekda Sukoharjo, Agus Santoso," ujar dia.

PT AS menggugat kerugian materiil sebesar Rp 6,2 miliar sebagai kekurangan pembayaran, dan potensi keuntungan Rp 2 miliar. Serta kerugian imateriil sebesar Rp 100 miliar.

"LHP BPK merekomendasikan kami masuk dalam daftar black list, itu sangat merugikan," ucapnya.

Sebelumnya Kepala BPK RI perwakilan Jateng Ignasius Bambang Adiputranta mengatakan, ada cacat mutu pada item pekerjaan, serta kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 4,085 miliar. (yan)